

Konstruksi Realitas Pemberitaan Kebijakan Vaksinasi Berbayar Di Portal Berita Online

Yona Voria Janesia

Universitas Indonesia

Jl. Salemba Rata No. 4, Kec. Senen, Kota Jakarta

E-mail: yona.voria@ui.ac.id

Received: February 2022; Accepted: April 2022; Published: June 2022

Abstract

This study aims to determine the framing of the news regarding the paid vaccination policy or “Vaksin Gotong Royong (VRG)” in Republika Online and Tempo.co. This research is a qualitative research with a constructionist paradigm. The research method used is framing analysis by Robert N. Entman. The framing of Republika Online and Tempo.co news is analyzed through four framing elements, which are problem definition, determining the cause of the problem, making moral decisions, and emphasizing problem solving. The result shows that Republika Online and Tempo.co construct the issue of paid vaccination policy with different framing. Republika Online constructed a paid vaccination policy as a strategic and rational effort to deal with Covid-19. Meanwhile, Tempo.co framed the issue of the paid vaccination policy as a polemic that drew a lot of criticism and rejection. The discourse strategies used by the two media can be observed through the way journalists choose diction, writing headlines, selecting sources, and the body of the news as a whole.

Keywords: news construction; framing; paid vaccination policy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui framing pada pemberitaan mengenai kebijakan vaksinasi berbayar atau “Vaksin Gotong Royong (VRG)” di Republika Online dan Tempo.co. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruksionis. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis framing oleh Robert N. Entman. Framing pada berita Republika Online dan Tempo.co dianalisis melalui empat elemen framing yaitu pendefinisian masalah, penentuan penyebab masalah, pembuatan keputusan moral, dan penekanan penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republika Online dan Tempo.co mengkonstruksi isu kebijakan vaksinasi berbayar dengan framing yang berbeda. Republika Online mengkonstruksi kebijakan vaksinasi berbayar sebagai upaya penanganan Covid-19 yang strategis dan rasional. Sedangkan Tempo.co membingkai isu kebijakan vaksinasi berbayar sebagai polemik yang mendatangkan banyak kritik dan penolakan. Strategi wacana yang digunakan kedua media tersebut dapat diamati melalui cara wartawan dalam pemilihan diksi, penulisan headline, pemilihan narasumber, dan tubuh berita secara keseluruhan.

Kata kunci: konstruksi berita; framing; kebijakan vaksinasi berbayar.

PENDAHULUAN

Dengan merebaknya penyebaran virus Corona atau Covid-19, pemerintah telah memberlakukan pembatasan sosial pada aktifitas warga untuk mencegah penyebaran virus yang merenggut nyawa di berbagai penjuru dunia. Beberapa bentuk pembatasan diantaranya adalah dengan pengalihan kerja di rumah, melarang kerumunan orang, memakai masker dan juga anjuran untuk menggunakan transaksi *online*. Anak sekolah pun terkena dampak dari maraknya penyebaran virus Covid-19. Guru dan murid sulit melakukan pendekatan personal karena waktu belajar mengajar yang relative singkat dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung (Rahardaya, 2021)

Sejak kemunculan kasus pertama Covid-19 di Indonesia, berita mengenai isu krisis kesehatan global tersebut kini menjadi sorotan bagi media massa maupun media *online* di Indonesia. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai Covid-19 juga dari media sosial bahkan dengan gaya humor yang tetap bersifat informative dan edukatif (Susanti, 2021) Selain itu pemerintah juga melakukan komunikasi ke masyarakat untuk memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran publik Indonesia untuk dapat berperilaku hidup sehat dan mengikuti protokol kesehatan agar penanganan COvid-19 dapat berjalan baik, efektif dan berhasil (Paramasari, 2021).

Selain itu, pemerintah juga telah menyusun beragam kebijakan di berbagai sektor terutama sektor ekonomi dan sosial sebagai upaya penanganan krisis akibat Covid-19 (Wiryawan, 2020). Salah satu program penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah adalah upaya pemberian vaksinasi terhadap seluruh lapisan masyarakat yang berlaku sejak Januari 2021. Pelaksanaan program tersebut tertuang dalam Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Nadia, 2021).

Pada proses pelaksanaannya, program pemberian vaksinasi tidak terlepas dari kendala dan tantangan yang dihadapi. Pertengahan Juni 2021, terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan cepat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia adalah dominasi varian delta SARS-CoV-2 yang menyebar di masyarakat (Gunadi, 2021), sehingga upaya pemerintah untuk memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 sangat diperlukan. Sejak meledaknya angka kasus Covid-19 tersebut, mencuat isu adanya inisiatif untuk vaksinasi berbayar atau disebut sebagai Vaksin Gotong Royong (VGR) oleh sektor swasta di luar vaksin pemerintah. Dengan harapan bahwa program vaksinasi bisa berjalan lebih cepat seperti target pemerintah sehingga sektor esensial nantinya bisa bekerja (Asmara, 2021).

Ketentuan vaksinasi Gotong Royong individu ini diatur dalam Permenkes No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkes No 10/2021 mengenai Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Azizah, 2021). Adapun rancangan vaksinasi berbayar tersebut dilayani oleh PT Kimia Farma (Persero) dengan menggunakan vaksin jenis Sinopharm yang diimpor dari China. Namun, seiring diskusi di ruang publik mengenai Vaksin Gotong Royong mencuat, kebijakan terkait vaksinasi berbayar tersebut menimbulkan polemik dari berbagai pihak. Pasalnya, vaksinasi berbayar dinilai tidak etis karena kesehatan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah, sedangkan vaksinasi berbayar dipandang beberapa pihak sebagai bisnis pemangku kepentingan di tengah-tengah kondisi krisis. Alih-alih sebagai upaya percepatan perluasan cakupan vaksinasi untuk menekan angka Covid-19, vaksinasi berbayar digadang-gadang hanya menguntungkan pihak tertentu dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Di tengah polemik yang bergulir mengenai pengadaan vaksinasi berbayar, media massa memiliki peran yang sentral dan krusial sebagai sumber informasi yang diharapkan mampu mengurangi segala ketidakpastian bagi masyarakat. Media massa, tidak terkecuali media berita

online, memiliki peranan yang strategis dalam menanggapi berbagai persoalan termasuk menjadi salah satu bentuk edukasi dini yang langsung menyasar terhadap masyarakat luas dengan efektif dan efisien (Syaipudin, 2020). Namun pada praktiknya, media tidak bisa melepaskan diri dari tarik menarik (*withdrawal*) kepentingan dan kekuasaan (Wafi & Haes, 2020). Oleh karena itu, banyak yang meyakini bahwa sebuah peristiwa yang sama dapat diberitakan secara berbeda oleh media karena bingkai (*frame*) yang berbeda (Santi, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk melihat *framing* berita vaksinasi berbayar di dua media berita *online* yang berbeda yang memiliki dua ideologi yang berbeda yaitu Republika Online dan Tempo.co. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana bentuk *framing* yang dilakukan oleh Republika Online dan Tempo.co dalam pemberitaan vaksinasi berbayar yang gencar diberitakan sejak awal Juli 2021. Dengan menggunakan analisis *framing*, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh isu-isu yang diseleksi dan aspek-aspek yang ditonjolkan dari kebijakan vaksinasi berbayar dalam berita-berita dari kedua media tersebut.

TINJAUAN LITERATUR

Fakta dari suatu peristiwa yang disajikan oleh media dalam sebuah berita telah melalui proses yang panjang karena apa yang disajikan oleh media tidak terlepas dari ideologi atau kepentingan media itu sendiri. Artinya, pemberitaan dalam media massa tergantung pada perspektif wartawan yang memiliki subjektivitas dan terpengaruh situasi internal organisasi media dan kekuatan eksternal yang ada (Santi, 2012). Konsep ini disebut sebagai *framing* atau cara media dalam membingkai berita. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Eriyanto, 2015). Dengan demikian, analisis *framing* mampu membongkar bagaimana realitas dibingkai oleh media.

Konstruksi realitas pada prinsipnya adalah menceritakan, mengkonseptualisasikan peristiwa, keadaan, dan benda (Karman, 2012). Pesan-pesan yang disampaikan oleh media melalui produk medianya dibangun dan dibentuk untuk suatu tujuan tertentu. Terdapat motif di balik setiap pesan yang ditampilkan dalam produk medianya, baik berupa berita, *headline*, liputan khusus, dan sebagainya (Chairani & Kania, 2014). Pada konteks penelitian ini, setiap media mampu menyuguhkan sudut pandang terkait kebijakan vaksinasi berbayar sesuai dengan realitas yang dibangun. Oleh karena itu, bentuk konstruksi dan cara media membingkai berita tidak terlepas dari subjektivitas wartawan dan nilai-nilai yang dipegang oleh media.

Cara media membingkai suatu peristiwa dalam berita menurut konsep analisis *framing* Robert N. Entman adalah melalui dua dimensi utama yaitu seleksi isu dan penekanan serta penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Dalam proses konstruksi, media memiliki kecenderungan untuk menyeleksi isu dan menonjolkan isu tersebut dengan berbagai strategi wacana yang dimilikinya (Eriyanto, 2015). Proses seleksi dengan memperhitungkan aspek realitas yang berbeda, sehingga beberapa aspek peristiwa lebih menonjol dari yang lain serta memberikan informasi dalam konteks tertentu, sehingga beberapa aspek tertentu lebih mendapat sorotan daripada yang lain (Sobur, 2012). Realitas yang dikonstruksi media melalui teknik *framing* dapat diamati melalui penyajian berita baik penonjolan aspek dari isu tertentu, penulisan *headline*, pemilihan narasumber, hingga pemilihan diksi dalam penulisan berita.

Pembingkaiian pada isu kebijakan vaksinasi berbayar juga dapat diamati pada media berita nasional yang gencar menginformasikan seputar kebijakan vaksinasi berbayar sejak awal Juli 2021 di antaranya Republika Online dan Tempo.co. Direktur utama Republika Online yaitu Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut sebagai salah satu yang menggagas program vaksinasi berbayar bersama dengan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Putri, 2021). Dengan posisinya

tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa Republika Online dalam setiap pemberitaannya termasuk saat menyorot kebijakan vaksinasi ini rentan dipengaruhi adanya kepentingan pandangan dari sosok Erick Thohir. Adapun Tempo.co dipilih sebagai komparasi karena Tempo.co dikenal sebagai media nasional yang identik dengan kritik kekuasaan sebagai idealismenya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menerapkan paradigma konstruksionis. Penelitian kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Siyoto & Sodik, 2015). Paradigma konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Bagi pandangan konstruksionis, fakta atau peristiwa dalam suatu berita adalah hasil konstruksi dan bersifat subjektif (Eriyanto, 2015). Secara garis besar, penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap analisis teks berita untuk mengetahui bagaimana media mengeksplorasi isu kebijakan vaksinasi berbayar serta penekanan aspek-aspek dari isu tersebut.

Metode yang digunakan adalah analisis *framing* dari Robert N. Entman untuk mengetahui konstruksi dan pembingkai berita kebijakan vaksinasi berbayar yang dilakukan oleh Republika Online dan Tempo.co. Fokus penelitian ini adalah teks berita dengan topik kebijakan vaksinasi berbayar yang diberitakan di Republika Online dan Tempo.co periode 10-16 Juli 2021. Pada periode tersebut, isu seputar kebijakan vaksinasi berbayar menjadi topik hangat di berbagai media termasuk kedua media tersebut. Dari sejumlah berita pada periode tersebut, peneliti memilih masing-masing lima berita dari Republika Online dan Tempo.co dengan teknik *purposive sampling*. Teknik sampling ini berkaitan dengan pilihan strategi terkait dengan siapa, di mana, dan bagaimana peneliti melakukan penelitian sehingga pemilihan sampel berkaitan dengan tujuan penelitian (Plays, 2008).

Teknik analisis data penelitian sebagaimana metode yang digunakan yaitu analisis *framing* model Robert N. Entman untuk menganalisis dan menyeleksi isu yang ditonjolkan dalam sajian berita. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan mengacu pada analisis *framing* model Entman tersebut. Analisis *framing* model Entman merujuk pada dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek.

Untuk melihat bagaimana pembingkai Republika Online dan Tempo.co dalam memberitakan kebijakan vaksinasi berbayar, teks berita dianalisis berdasarkan elemen-elemen dalam *framing* Entman. Elemen pertama yaitu pendefinisian masalah (*define problem*), mengacu pada bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan termasuk konsepsi dan skema interpretasinya. Kedua, penyebab masalah (*diagnose causes*) yaitu elemen yang membingkai siapa (*who*) atau apa (*what*) yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Ketiga, keputusan moral (*moral judgment*) yaitu elemen untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang bertujuan untuk mendukung gagasan tersebut. Keempat, penekanan penyelesaian (*treatment recommendation*) yaitu elemen terkait penyelesaian atau solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu (Eriyanto, 2015).

Penyajian data hasil penelitian berupa hasil analisis terhadap teks berita yang dikomparasikan antara berita kebijakan vaksinasi berbayar dari Republika Online dan Tempo.co berdasarkan analisis *framing* model Entman. Penyajian data (*displaying data*), dimungkinkan agar informasi (hasil penelitian) yang diperoleh menjadi lebih menarik, berguna dan mudah dipahami (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu terkait kebijakan vaksinasi berbayar mulai gencar diberitakan Republika Online dan Tempo.co sejak awal Juli 2021. Berdasarkan hasil pengumpulan artikel berita yang dipublikasikan pada periode 10-16 Juli 2021, penulis memilih masing-masing lima artikel berita sesuai dengan kebutuhan dalam proses analisis dan pengkajian objek yang diteliti. Berita yang dipilih adalah berita yang menitikberatkan pada isu program vaksinasi berbayar sebagai suatu kebijakan yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 1. Judul Artikel Berita Republika Online

No.	Judul	Tanggal Terbit
1	Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara	12 Juli 2021
2	Vaksin Gotong Royong Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat	13 Juli 2021
3	Erick Thohir Jawab Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong	13 Juli 2021
4	Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong	14 Juli 2021
5	Hipmi PT Dukung Program Vaksinasi Gotong Royong Pemerintah	15 Juli 2021

Sumber: Hasil Penelitian

Tabel 2. Judul Artikel Berita Tempo.co

No.	Judul	Tanggal Terbit
1	KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi Individu Berbayar: Berpotensi Komersialisasi	12 Juli 2021
2	Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi	13 Juli 2021
3	Sederet Kritik terhadap Program Vaksinasi Berbayar	13 Juli 2021
4	Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar Membuat Publik Ragu Kualitas Vaksin Gratis	14 Juli 2021
5	Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar, Koalisi Curiga Ada Motif Cuan	15 Juli 2021

Sumber: Hasil Penelitian

Frame Republika Online: Kebijakan Vaksinasi Berbayar Sebagai Upaya Pemerintah Menangani Kondisi Krisis

Selama kurun waktu 10-16 Juli 2021, terdapat kurang lebih 37 artikel berita yang dilaporkan dan dipublikasikan oleh Republika Online seputar kebijakan vaksinasi berbayar. Jumlah artikel berita tersebut sedikit lebih banyak dibandingkan berita kebijakan vaksinasi berbayar yang ditulis oleh Tempo.co.

Berdasarkan hasil penelitian, pada aspek seleksi isu Republika Online menampilkan informasi mengenai dukungan secara positif terhadap kebijakan vaksinasi berbayar dari berbagai pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari pemilihan narasumber dalam berita-berita Republika Online yang notabene adalah pihak pemerintah (anggota Komisi IV DPR, politikus Partai Nasdem, mantan staf khusus Kantor Staf Presiden, dan lainnya), pengamat, dan lembaga yang bergerak di bidang industri terkait yang mendukung kebijakan tersebut, termasuk Erick Thohir selaku Menteri BUMN yang juga Direktur Utama Republika. Sebagian besar narasumber tersebut mendukung adanya kebijakan vaksinasi berbayar dilihat dari isi wawancara atau pendapat yang dikutip oleh Republika Online.

Adapun pada dimensi penonjolan aspek, Republika Online memilih menggunakan kata Vaksin Gotong Royong (VGR) untuk menyebut kebijakan program vaksinasi berbayar di

hampir seluruh berita yang diamati. Penggunaan sebutan Vaksin Gotong Royong sebagaimana nama yang diusung pemerintah tersebut ditujukan untuk menampilkan citra yang baik mengenai kebijakan vaksinasi berbayar. Citra baik tersebut dikonstruksi Republika Online agar program vaksinasi berbayar ini terkesan tidak komersil atau berkaitan dengan citra negatif lainnya bagi khalayak. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat yang tertera dalam setiap *headline* berita maupun tubuh berita Republika Online.

1. Pendefinisian masalah (*defining problems*)

Hasil analisis terhadap identifikasi masalah (*defining problems*) yang dikembangkan oleh Republika Online terhadap kebijakan vaksinasi berbayar adalah sebagai upaya pemerintah dalam menangani kondisi krisis akibat pandemi. Sehingga, kebijakan vaksinasi berbayar dikemas sebagai kebijakan strategis yang patut didukung oleh korporasi, swasta, dan segenap lapisan masyarakat, sebagaimana pada Tabel 3.

Tabel 3. Elemen *Defining Problems* Berita Republika Online

Judul	<i>Defining Problems</i> dalam Teks Berita
Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara	Vaksinasi Gotong Royong merupakan bentuk partisipasi membantu pemerintah mengurangi beban biaya Negara dalam menangani pandemi Covid-19.
Vaksin Gotong Royong Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat	Kebijakan VGR mendapat dukungan dan apresiasi dari beberapa pengamat karena dinilai sebagai terobosan pemerintah dalam menghadapi kondisi krisis.
Erick Thohir Jawab Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong	Tuduhan terhadap VGR yang menggunakan dana APBN disanggah oleh Erick Thohir.
Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah potensi pidana yang muncul terkait vaksin Gotong Royong.
Hipmi PT Dukung Program Vaksinasi Gotong Royong Pemerintah	Kebijakan VGR mendapat dukungan dari Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada (Hipmi-PT UGM) Geraldly Sam dan Ketua Umum BPP Hipmi terkait rencana vaksin gotong royong berbayar atau mandiri untuk bisa mempercepat target vaksinasi nasional.

Sumber: Hasil Penelitian

Definisi isu kebijakan vaksinasi berbayar tersebut dikemukakan dalam berbagai sudut pandang. Pada artikel berita yang berjudul “Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara” (12 Juli 2021), Republika Online menunjukkan *frame* yang dapat dilihat dari cara bagaimana wartawan mendefinisikan masalah yang tertera pada kutipan di tubuh berita berikut:

“Vaksinasi Gotong Royong Merupakan bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah”.

Pendefinisian masalah tersebut dipertegas wartawan dengan mengutip hasil wawancara bersama salah satu narasumber yaitu anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, yang mendukung secara positif gerakan VGR dengan argumen bahwa kebijakan Vaksin Gotong Royong mampu mengurangi beban biaya negara dalam menjalankan program pemberian vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada kutipan tidak langsung selanjutnya, Republika Online juga menuliskan Vaksin Gotong Royong sebagai cermin dari dimensi keadilan sebagaimana yang disarikan dari hasil narasumbernya bersama Nusron Wahid.

Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid, juga menyambut positif gerakan Vaksinasi Gotong Royong berbayar. Nusron mengajak semua pihak untuk tidak apriori. “Saya kira ini positif. Sebab, dia (orang yang ingin vaksinasi berbayar) merasa dirinya mampu. Tidak mau

membebani negara. Makanya bersedia bayar," ujar Nusron.

Pada artikel lainnya, penekanan Republika Online dalam membentuk *frame* positif melalui pendefinisian kebijakan vaksinasi berbayar dilakukan dengan menggunakan *headline* "Vaksin Gotong Royong Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat". Kalimat pada *headline* tersebut mengemukakan bahwa kebijakan vaksinasi berbayar tidak bertentangan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menggratiskan pelaksanaan vaksin, justru dinilai sebagai kebijakan cerdas karena sesuai dengan asas keadilan masyarakat.

"Ini kebijakan legitimate, bagi saya fair dan cerdas dalam perspektif menghadapi tekanan pandemi Covid-19 multisektor," kata mantan staf khusus Kantor Staf Presiden tersebut.

Berdasarkan hasil analisis pada lima artikel berita Republika Online, terdapat dua isu yang diangkat dari sisi kritik terhadap vaksinasi berbayar. Namun, pengambilan sudut pandang dan penyajian fakta pada dua artikel tersebut tetap menunjukkan definisi masalah kebijakan vaksinasi berbayar dari *frame* yang mendukung secara positif. Pada artikel berita "Erick Thohir Jawab Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong" (13 Juli 2021), wartawan memilih diksi "tuduhan" pada penulisan *headline* berita yang bermakna menunjuk dan mengatakan bahwa sesuatu itu bersifat kurang baik, dibandingkan diksi "kritik" yang mengandung makna kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sudut pandang yang diambil pun berasal dari Erick Thohir yang membantah VGR menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan meyakini bahwa program VGR berjalan secara transparan. Erick Thohir mengaku telah mendengar tuduhan VGR menggunakan vaksin hibah. Namun, wartawan Republika Online tidak menyertakan sudut pandang dari narasumber yang melayangkan tuduhan yang dimaksud.

Pada artikel lainnya yang berjudul "Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong" (13 Juli 2021), isu adanya potensi sejumlah potensi pidana yang muncul terkait vaksin Gotong Royong. Meskipun demikian, penonjolan aspek dalam penulisan berita tersebut menunjukkan sudut pandang dari pihak KPK terhadap vaksinasi berbayar sebatas saran bukan bentuk penolakan. Informasi yang disajikan adalah saran dari KPK berupa langkah-langkah mitigasi guna mencegah timbulnya tindakan pidana tersebut. Dengan demikian, kebijakan vaksinasi berbayar di antara lima artikel Republika Online tersebut didefinisikan dalam *frame* yang positif.

2. Penyebab masalah (*diagnose problems*)

Berdasarkan hasil analisis pada elemen penyebab masalah (*diagnose problems*) dari isu kebijakan vaksinasi berbayar, Republika Online lebih menonjolkan bahwa penyebab permasalahannya adalah karena dua hal. Pertama, kondisi krisis seperti munculnya virus varian baru yaitu Delta, kurangnya tenaga kesehatan, melonjaknya angka kasus Covid-19, dan tingginya jumlah kasus meninggal. Kedua, pihak-pihak yang mengkritik atau menolak kebijakan vaksinasi berbayar tersebut.

Pengemasan berita tersebut menunjukkan urgensi dilaksanakannya program Vaksin Gotong Royong. Cara wartawan Republika Online menentukan kondisi krisis akibat virus varian Delta dan memuncaknya angka kasus Covid-19 sebagai penyebab masalah, menampilkan sisi urgensi yang tinggi di balik kebijakan vaksinasi berbayar. *Frame* yang terbentuk kemudian adalah bahwa pentingnya realisasi kebijakan vaksinasi berbayar untuk menangani kondisi krisis akibat pandemi. Secara umum, penyebab masalah pada tiap artikel judul berita terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4. Elemen *Diagnose Problems* Berita Republika Online

Judul	<i>Diagnose Problems</i> dalam Teks Berita
Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara	Ketika pandemi memuncak kembali akibat virus varian Delta, muncullah aspirasi agar sebagai upaya percepatan vaksin.
Vaksin Gotong Royong Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat	Sejumlah pihak yang langsung menyerang pemerintah atas kebijakan Vaksin Gotong Royong
Erick Thohir Jawab Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong	Kondisi kekurangan tenaga kesehatan, varian delta yang tingkat penularan cepat, dan banyaknya jumlah yang meninggal
Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong	Penjualan VGR ke individu melalui Kimia Farma masih berisiko tinggi terjadi korupsi meskipun sudah dilengkapi dengan permenkes
Hipmi PT Dukung Program Vaksinasi Gotong Royong Pemerintah	Maraknya penyebaran varian Delta akhir-akhir ini.

Sumber: Hasil Penelitian

Di samping akibat kondisi kritis sebagai penyebab masalah, terdapat satu artikel di mana Republika Online memperkirakan penyebab masalah dalam isu kebijakan vaksinasi berbayar adalah sejumlah pihak yang dinilai menyerang pemerintah atas kebijakan Vaksin Gotong Royong. Masalah tersebut dikemukakan dalam artikel berita berjudul “Vaksin Gotong Royong Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat” (13 Juli 2021). Pernyataan tersebut dikemukakan dari sudut pandang Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho, melalui kutipan berita berikut:

Dimas menyayangkan sejumlah pihak yang langsung menyerang pemerintah atas kebijakan Vaksin Gotong Royong ini. "Vaksin gratis untuk rakyat kan tetap berjalan, sementara vaksin berbayar bagi segmen industri dan kalangan menengah atas juga dibuka, kualitas vaksin dan pelayanannya tetap sama baiknya," ucapnya.

Berdasarkan kutipan berita tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa bentuk kritik dari berbagai pihak terhadap kebijakan vaksinasi berbayar dianggap sebagai kendala atau penyebab masalah pada isu ini. Namun, Republika Online tidak menampilkan seperti apa bentuk kritik dan pihak mana saja yang dianggap menyerang pemerintah atas kebijakan VGR tersebut.

Adapun pada artikel berita berjudul “Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong” memposisikan adanya penyebab masalah lain dalam isu kebijakan vaksinasi berbayar yaitu penjualan VGR ke individu melalui Kimia Farma masih berisiko tinggi terjadi korupsi meskipun sudah dilengkapi dengan permenkes. Masalah tersebut dikemukakan oleh ketua KPK, Firli Bahuri, yang merincikan penyebab masalah dari resiko terjadinya korupsi dapat timbul baik dari sisi medis maupun control vaksin. Dengan demikian, ada potensi potensi kemunculan *reseller*, efektivitas program yang rendah, dan jangkauan Kimia Farma yang terbatas. Pada artikel ini, tidak lantas tampak penolakan dari pihak KPK terhadap program VGR karena sifatnya berupa saran dan himbauan.

3. Keputusan moral (*moral judgment*)

Hasil analisis pada elemen keputusan moral (*moral judgment*), Republika Online mengedepankan informasi yang meyakinkan khalayak bahwa kebijakan vaksinasi berbayar adalah keputusan tepat untuk menyiasati kondisi krisis dan strategi pemerintah untuk mempercepat penanganan isu kesehatan akibat Covid-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat. Keputusan moral yang dibangun Republika Online melalui isi pemberitaan mengesankan opini khalayak bahwa program VGR aman dan dinilai efektif baik dari segi pelaksanaan maupun sisi medisnya.

Tabel 5. Elemen *Moral Judgment* Berita Republika Online

Judul	<i>Moral Judgment</i> dalam Teks Berita
Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara	Menurut Nusron (Anggota Komisi VI DPR), program VGR mencerminkan dimensi keadilan.
Vaksin Gotong Royong Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat	Dimas Oki Nugroho (mantan staf khusus Kantor Staf Presiden) menilai, Vaksin Gotong Royong sebagai kebijakan <i>legitimate</i> , adil dan cerdas dalam perspektif menghadapi tekanan pandemi Covid-19.
Erick Thohir Jawab Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong	Vaksinasi merupakan proteksi awal menghadapi cepatnya penularan varian Delta dan juga tingginya tingkat kematian.
Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong	Pemerintah agar transparan terkait data alokasi dan penggunaan vaksin gotong royong memastikan tidak terjadi praktik-praktik kecurangan dalam seluruh proses pelaksanaan vaksin gotong royong. Data menjadi kata kunci agar pelaksanaan vaksin gotong royong dapat berjalan dengan baik.
Hipmi PT Dukung Program Vaksinasi Gotong Royong Pemerintah	Dari program vaksin mandiri, Geraldny berharap, dapat mempercepat target vaksinasi pemerintah. Sehingga dapat mempercepat pulihnya seluruh aktivitas kegiatan yang nantinya akan berdampak kepada pulihnya perekonomian negara, khususnya bagi pengusaha UMKM.

Sumber: Hasil Penelitian

Elemen framing ini juga dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat, dalam hal ini yaitu adanya kebijakan vaksinasi berbayar. Keputusan moral dari kebijakan vaksinasi berbayar yang dikonstruksi Republika Online terdiri dari dua aspek yaitu alasan moral untuk isu kesehatan dan alasan moral untuk isu pemulihan ekonomi. Pada artikel berita berjudul “Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara” (12 Juli 2021), pesan moral yang dibangun Republika Online adalah nasihat tentang mengutamakan semangat gotong yang diwujudkan dalam bentuk dukungan pada pemerintah terhadap program vaksinasi berbayar sebagaimana pada kutipan berita berikut:

Dalam situasi yang tidak mudah, dan pemerintah terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi, maka semangat gotong royong terus dikedepankan. Menurut Hasto, percepatan vaksinasi adalah salah satu kebijakan, yang menyatu dengan kebijakan lainnya.

Pada artikel berita Republika Online yang berjudul “Vaksin Gotong Royong Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat” (13 Juli 2021), nilai moral yang digunakan untuk melegitimasi kebijakan vaksinasi berbayar adalah munculnya pertentangan rasa keadilan jika pemberian vaksin tidak diberlakukan secara sesuai antara kalangan menengah rentan hingga menengah ke bawah dan kalangan yang mampu.

“Vaksin gratis dijalankan menyasar pada kalangan kelas menengah rentan dan kelas menengah ke bawah. Apabila mereka yang termasuk the have atau mungkin warga negara asing juga mendapatkan fasilitas vaksin gratis, hal ini justru bisa mengarah pada sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan,” ujar Airlangga.

Pernyataan tersebut kemudian dipertegas dengan sudut pandang narasumber dari Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho, yang juga mendukung kebijakan vaksinasi berbayar sebagai langkah inovatif pemerintah dengan mengedepankan kepentingan upaya pemulihan ekonomi masyarakat untuk melegitimasi kebijakan vaksinasi berbayar.

Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho memuji langkah inovatif pemerintah terkait kehadiran program vaksin individu. Dalam situasi kebutuhan rill percepatan pelaksanaan vaksinasi dan upaya pemulihan ekonomi, kata Dimas, inisiatif Kemenkes, Kementerian BUMN, dan Kimia Farma sudah tepat.

4. Rekomendasi penyelesaian masalah (*treatment recommendations*)

Berdasarkan hasil analisis pada elemen *treatment recommendations*, atas seluruh berita polemik kebijakan vaksinasi berbayar, Republika Online merekomendasikan untuk tetap mendukung kebijakan vaksinasi berbayar dengan mempercayakan pemerintah dalam proses pelaksanaannya harus disertai sistem yang jelas, sehingga program Vaksin Gotong Royong ini direkomendasikan sebagai langkah tepat dalam upaya penanganan kondisi krisis.

Tabel 6. Elemen *Treatment Recommendations* Berita Republika Online

Judul	<i>Treatment Recommendations</i> dalam Teks Berita
Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara	Irma Suryani Chaniago (Politikus Partai Nasdem) mengingatkan kepada para pengkritik untuk berhenti membuat gaduh dengan komentar-komentar negatif terhadap program vaksinasi mandiri.
Vaksin Gotong Royong Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat	Dalam kondisi krisis, negara harus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sekaligus memenuhi rasa keadilan. Mereka yang mampu terutama dari kalangan kelas menengah ke atas sudah seharusnya membayar vaksin untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 secara cepat.
Erick Thohir Jawab Tuduhan Seputar Vaksin Gotong Royong	Erick berencana pelaksanaan program vaksinasi gotong royong akan menggandeng asosiasi selain Kadin semisal HIPMI hingga asosiasi industri mebel.
Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong	"Perlu dibangun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan vaksin gotong royong secara transparan, akuntabel," kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Hipmi PT Dukung Program Vaksinasi Gotong Royong Pemerintah	Kombinasi antara vaksinasi gratis dan juga mandiri dapat saling melengkapi sebagai alternatif pilihan untuk mempercepat perluasan cakupan vaksinasi masyarakat.

Sumber: Hasil Penelitian

Rekomendasi tersebut diperkuat dengan pernyataan-pernyataan para narasumber yang mengusulkan perencanaan program Vaksin Gotong Royong. Rekomendasi tersebut tidak hanya berupa saran namun juga penjelasan terkait bagaimana cara para pihak pelaksana terkait menjalankan rencana kebijakan tersebut. Dari pihak Menteri BUMN selaku inisiator kebijakan vaksinasi berbayar mengemukakan rencana pelayanan program Vaksin Gotong Royong yaitu bekerja sama dengan Kimia Farma pada tahap awal perencanaan sebagaimana pada kutipan berikut:

Erick mengatakan Kimia Farma sebagai anggota holding BUMN farmasi memiliki 1.300 klinik yang dilengkapi tenaga kesehatan dan dokter yang bisa dimanfaatkan melayani vaksinasi gotong royong. Untuk tahap awal, ucap Erick, delapan klinik Kimia Farma akan menjadi pionir program vaksinasi gotong royong untuk individu.

Republika Online juga memberikan porsi bagi rekomendasi yang disampaikan oleh KPK selaku pihak di luar pelaksana program vaksinasi berbayar. KPK turut mengawasi program tersebut dengan menekankan peran pemerintah agar sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan Vaksin Gotong Royong dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang dikutip dalam tubuh berita berjudul "Ini Saran KPK Untuk Vaksin Gotong Royong" (14 Juli 2021).

Rekomendasi penyelesaian masalah atas adanya kritik terhadap kebijakan vaksinasi berbayar dikemukakan pada artikel berjudul “Vaksinasi Gotong Royong Harus Didukung, Kurangi Beban Negara” (12 Juli 2021). *Republika Online* menuturkan hasil wawancara bersama Irma Suryani Chaniago, politikus Partai Nasdem, bahwa kritik ataupun komentar negatif tentang kebijakan vaksinasi berbayar dinilai hanya membuat gaduh. Alih-alih menyerap kritik tersebut, narasumber menegaskan untuk berhenti memberikan komentar negatif terhadap program Vaksin Gotong Royong tersebut.

“Irma mengingatkan kepada para pengkritik untuk berhenti membuat gaduh dengan komentar-komentar negatif terhadap program vaksinasi mandiri ini”.

Frame Tempo.co: Polemik dalam Kebijakan Vaksinasi Berbayar

Berita tentang kebijakan vaksinasi berbayar yang dilaporkan oleh *Tempo.co* selama kurun waktu 10-16 Juli 2021 terdapat kurang lebih 30 artikel berita. Sebagian besar, berita-berita terkait kebijakan vaksinasi berbayar disajikan dalam kanal berita nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, pada dimensi seleksi isu yaitu terkait pemilihan fakta dari kebijakan vaksinasi berbayar, *Tempo.co* menampilkan aspek kompleksitas kebijakan vaksinasi berbayar berupa kritik dan kontroversi terhadap kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, *Tempo.co* lebih banyak menampung suara dari pihak kontra atau yang memperlakukan kebijakan vaksinasi berbayar. Berbeda dengan *Republika Online* yang memberikan sebagian besar ruang untuk pemerintah dan pemangku kepentingan sebagai sumber informasi utama, *Tempo.co* menyajikan narasumber yang lebih beragam pada lima artikel berita yang dianalisis. Narasumber tersebut terdiri dari berbagai kalangan di antaranya organisasi buruh yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan, Koalisi Laporan Covid-19, kalangan akademik yaitu epidemiolog, pihak Kimia Farma dan dari pihak pemerintah itu sendiri.

Adapun pada dimensi penonjolan aspek yaitu terkait cara penulisan fakta, *Tempo.co* tetap menampilkan sudut pandang yang berimbang meskipun yang ditonjolkan pada pemberitaannya adalah ragam kritik dan permasalahan yang ditujukan untuk kebijakan vaksinasi berbayar. *Tempo.co* menyediakan dua sisi sudut pandang sehingga memenuhi unsur *cover both sides* dalam penulisan berita.

Sedangkan analisis terhadap *headline* berita, wartawan *Tempo.co* tidak secara khusus menyebut kebijakan vaksinasi berbayar sebagai program Vaksin Gotong Royong (VGR) sebagaimana pada *headline* *Republika Online*. Pemilihan diksi untuk program tersebut di *headline* *Tempo.co* lebih banyak menggunakan “vaksin berbayar”, “vaksinasi individu berbayar”, atau “vaksin Covid-19 berbayar”. Perbedaan antara penyebutan nama kebijakan atau program tersebut pada *headline* *Republika Online* dan *Tempo.co* menampilkan citra yang berbeda. Citra yang ditampilkan *Tempo.co* melalui pemilihan diksi pada *headline* tersebut mengandung unsur komersil yang melekat pada program vaksin berbayar.

1. Pendefinisian masalah (*defining problems*)

Hasil analisis terhadap elemen pendefinisian masalah (*defining problems*), *Tempo.co* secara umum mendefinisikan isu terkait kebijakan vaksinasi berbayar sebagai polemik di mana kebijakan ini mengundang banyak kritik dan persoalan dari berbagai pihak. Maka, *frame* yang dikonstruksi *Tempo.co* adalah bahwa kebijakan vaksinasi berbayar bukan langkah yang tepat untuk menangani kondisi krisis justru menimbulkan keresahan dan persoalan-persoalan baru. Pendefinisian masalah tersebut secara umum diuraikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Elemen *Defining Problems* Berita Tempo.co

Judul	<i>Defining Problems dalam Teks Berita</i>
KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi Individu Berbayar: Berpotensi Komersialisasi	KSPI mempermasalahkan pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar, baik program vaksin gotong royong maupun vaksin berbayar secara individu yang rencananya dikeluarkan oleh Kimia Farma
Epidemiolog Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi	Keberadaan vaksin Covid-19 berbayar individu kontraproduktif terhadap langkah penanggulangan Covid-19 di Indonesia
Sederet Kritik terhadap Program Vaksinasi Berbayar	Kebijakan vaksinasi berbayar mendatangkan sejumlah kritikan yang disampaikan sejumlah pihak dan institusi terkait program tersebut
Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar Membuat Publik Raguh Kualitas Vaksin Gratis	Program vaksin berbayar atau vaksin gotong royong dapat membuat publik ragu dengan kualitas vaksin pemerintah
Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar, Koalisi Curiga Ada Motif Cuan	Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan mencurigai pemerintah yang lebih mementingkan ekonomi ketimbang kesehatan dalam menangani pandemi

Sumber: Hasil Penelitian

Pada elemen pendefinisian ini, kebijakan vaksinasi berbayar dianggap permasalahan yang berkaitan dengan isu komersialisasi vaksin, masalah etis kemanusiaan, dan isu kepercayaan publik. Pada artikel berita Tempo.co yang berjudul “KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi Individu Berbayar: Berpotensi Komersialisasi” (12 Juli 2021), konsepsi dan konstruksi wartawan Tempo.co terkait kebijakan vaksinasi berbayar adalah potensi komersialisasi vaksin sehingga menguntungkan pihak-pihak tertentu. Pada berita tersebut, Tempo.co menyitir keterangan tertulis dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

“Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Juli 2021.

Wartawan Tempo.co juga secara lengkap merangkum ragam kritikan terhadap kebijakan vaksinasi berbayar dari berbagai sumber baik dari wawancara langsung, keterangan tertulis, hingga opini melalui media sosial. Rangkuman sejumlah kritik tersebut dilaporkan pada artikel berita berjudul “Sederet Kritik terhadap Program Vaksinasi Berbayar” (13 Juli 2021). Cara bagaimana wartawan Tempo.co menghimpun kritikan dari berbagai sumber menampilkan upaya Tempo.co dalam menonjolkan kompleksitas kebijakan vaksinasi berbayar. Bahwa kebijakan tersebut tidak didefinisikan secara murni sebagai suatu upaya penanganan pandemi Covid-19, melainkan ada politik kepentingan di balik kebijakan tersebut.

Pada artikel berita yang dipublikasikan Tempo.co pada 15 Juli 2021, wartawan Tempo.co menuliskan *headline* “Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar, Koalisi Curiga Ada Motif Cuan”. Penggunaan diksi “Ngotot” pada *headline* menunjukkan Tempo.co ingin menekankan bahwa pemerintah terlalu memaksakan kehendak untuk mewujudkan program vaksinasi berbayar. Citra yang dikonstruksi oleh wartawan Tempo.co pada isi berita tersebut menampilkan kejanggalan pada kebijakan vaksinasi berbayar yaitu adanya motif bisnis untuk pihak-pihak tertentu.

2. Penyebab masalah (*diagnose problems*)

Berdasarkan hasil analisis pada elemen penyebab masalah (*diagnose problems*) dari isu kebijakan vaksinasi berbayar, Tempo.co menempatkan pihak pemerintah dan BUMN sebagai aktor utama penyebab masalah dalam polemik kebijakan vaksinasi berbayar. Pihak pemerintah dalam hal ini termasuk Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, dan pihak-pihak terkait, dinilai memiliki kepentingan di balik kebijakan vaksinasi berbayar. Kepentingan tersebut tidak lain adalah kepentingan ekonomi. Alasan tersebut yang membuat banyak pihak mengkritisi bahkan menolak adanya kebijakan vaksinasi berbayar. Tabel 8 berikut menunjukkan elemen penyebab masalah dalam berita Tempo.co.

Tabel 8. Elemen *Diagnose Problems* Berita Tempo.co

Judul	<i>Diagnose Problems</i> dalam Teks Berita
KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi Individu Berbayar: Berpotensi Komersialisasi	Produsen vaksin dan pemerintah selaku pembuat regulasi berpotensi mengkomersilkan vaksin
Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi	Pemerintah adalah pihak penyebab masalah atas langkah penanggulangan Covid-19 yang tidak tepat
Sederet Kritik terhadap Program Vaksinasi Berbayar	Pemerintah, Presiden RI, dan pihak industri farmasi milik BUMN sebagai penyebab masalah dalam isu kebijakan vaksinasi berbayar
Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar Membuat Publik Ragu Kualitas Vaksin Gratis	Menteri Kesehatan dinilai aneh dalam menyelesaikan persoalan stok vaksin
Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar, Koalisi Curiga Ada Motif Cuan	Pemerintah dan pihak BUMN sebagai aktor kepentingan yang diuntungkan dalam kebijakan vaksinasi berbayar

Sumber: Hasil Penelitian

Wartawan Tempo.co mengemas berita-berita terkait penyebab masalah dalam kebijakan vaksinasi berbayar secara kritis. Pemerintah dan BUMN dinilai sebagai penyebab masalah dalam polemik vaksinasi berbayar karena kebijakan tersebut memicu banyak persoalan bagi publik. Salah satunya adalah adanya diskriminasi antara pengguna vaksin berbayar dan pengguna vaksin gratis. Sikap kontra terhadap kebijakan vaksinasi berbayar ditegaskan oleh epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman yang mengatakan bahwa keberadaan vaksin Covid-19 berbayar kontraproduktif terhadap langkah penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Tempo.co menyitir kutipan hasil wawancaranya pada artikel berita berjudul "Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi" (13 Juli 2021).

"Kalau bicara vaksin itu jangan sampai ada terkesan vaksin bagus untuk yang bisa bayar, itu gak boleh. Selain tak etis, itu diskriminatif," kata Dicky saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Juli 2021.

Tempo.co juga mengkonstruksi citra pemerintah yang lekat dengan adanya motif ekonomi di balik program-program atau kebijakan yang dibuat. Konsepsi dan konstruksi citra tersebut ditampilkan wartawan Tempo.co dengan menekankan kasus-kasus sebelumnya yang terjadi. Kasus ekspor benur dan korupsi bantuan sosial masyarakat pada masa pandemi menjadi dua contoh bentuk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka muncul kecurigaan akan terjadi hal yang sama pada program vaksinasi berbayar. Pengemasan berita tersebut menampilkan ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Sebagaimana pada kutipan teks berita berikut:

Anggota koalisi lainnya dari YLBHI, Muhammad Isnur, mengaku khawatir program ini hanya untuk ajang mencari keuntungan. Ia mengatakan sudah bukan barang baru ketika ada

program pemerintah yang berujung pada praktik lancung. Ia mencontohkan ekspor benur dan bantuan sosial masyarakat terdampak pandemi. Dua program ini menyeret sang menteri ke pengadilan.

3. Keputusan moral (*moral judgment*)

Hasil analisis pada elemen keputusan moral (*moral judgment*), Tempo.co mengaitkan kebijakan vaksinasi berbayar dengan moral kemanusiaan. Melalui pengemasan beritanya, Tempo.co menyiratkan bahwa pemerintah justru berlaku tidak sepatutnya dengan mengadakan vaksinasi berbayar di tengah kondisi krisis pandemi Covid-19. Keputusan moral yang dibangun Tempo.co menunjukkan bahwa langkah pemerintah membuat kebijakan vaksinasi berbayar adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peran pemerintah yang bertanggung jawab atas penanganan pandemi Covid-19.

Tabel 9. Elemen *Moral Judgment* Berita Tempo.co

Judul	<i>Moral Judgment</i> dalam Teks Berita
KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi Individu Berbayar: Berpotensi Komersialisasi	Pemberian vaksin kepada rakyat termasuk kaum buruh dan keluarganya untuk mencegah meluasnya penyebaran Pandemi Covid-19 adalah tugas negara.
Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi	Prinsip vaksin dalam masa pandemi adalah gratis agar menjamin kesetaraan dan akses yang merata untuk semua penduduk tanpa diskriminasi.
Sederet Kritik terhadap Program Vaksinasi Berbayar	Pasokan vaksin masih terbatas. Praktik jualan vaksin adalah tindakan biadab. Epidemiolog percaya hati nurani Budi Gunadi Sadikin untuk punya keberanian menghapus konsep vaksinasi berbayar karena tidak sesuai konstitusi dan UU Karantina.
Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar Membuat Publik Ragu Kualitas Vaksin Gratis	Pemerintah harusnya berkomitmen untuk melindungi rakyatnya, melakukan perdagangan vaksin hanya akan menguntungkan pihak tertentu.
Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar, Koalisi Curiga Ada Motif Cuan	KPC-PEN dibentuk untuk mengimbangi <i>public health</i> dan <i>economy recovery</i> , tapi dalam perjalanannya lebih mengedepankan ekonomi

Sumber: Hasil Penelitian

Dalam frame Tempo.co, penanganan pandemi Covid-19 termasuk dengan pemberian vaksin adalah tugas dan tanggung jawab negara. Pada dasarnya, upaya penanggulangan pandemi Covid-19 oleh pemerintah harus didukung oleh setiap elemen bangsa termasuk pemberian vaksin. Meskipun aspek yang ditonjolkan Tempo.co adalah kritik terhadap program vaksinasi berbayar, Tempo.co mengawali lead berita dengan pernyataan dukungan terhadap pemerintah untuk menangani Covid-19. Pada artikel berjudul “KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi Individu Berbayar: Berpotensi Komersialisasi” (12 Juli 2021), lead berita dituliskan sebagai berikut:

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara vaksinasi. Pemberian vaksin kepada rakyat termasuk kaum buruh dan keluarganya untuk mencegah meluasnya penyebaran Pandemi Covid-19, menurut mereka, adalah tugas negara. Oleh karena itu, KSPI menilai apapun bentuk dan strategi pemberian vaksin termasuk pembiayaannya kepada seluruh rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengusaha, termasuk dimulainya program vaksin gotong royong dan vaksin berbayar secara individu.

Namun, dengan mengadakan layanan vaksinasi berbayar, sikap pemerintah justru bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Hal itu karena vaksinasi berbayar dinilai tidak sesuai prinsip terkait kesetaraan akses kesehatan. Maka, masalah yang muncul adalah diskriminasi pelayanan vaksin. Sebagaimana kutipan berita pada artikel “Epidemiolog

Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi” (13 Juli 2021).

Dicky mengatakan prinsip vaksin dalam masa pandemi adalah gratis agar menjamin kesetaraan dan akses yang merata untuk semua penduduk tanpa diskriminasi. Hal itu akan membantu peningkatan cakupan vaksinasi.

Langkah pemerintah dalam menangani kondisi krisis juga dinilai lebih mementingkan persoalan ekonomi dibandingkan kesehatan publik, terbukti dengan adanya kebijakan vaksinasi berbayar. Sudut pandang tersebut dikemukakan oleh Perwakilan Koalisi dari Laporan Covid-19, Amanda Tan, melalui wawancaranya dengan Tempo.co. Berikut kutipan dalam berita Tempo.co.

"KPC-PEN dibentuk untuk mengimbangi public health dan economy recovery, tapi dalam perjalanannya lebih mengedepankan ekonomi," kata Amanda, pada Rabu, 14 Juli 2021.

4. Rekomendasi penyelesaian masalah (*treatment recommendations*)

Berdasarkan hasil analisis pada elemen *treatment recommendations*, Tempo.co menekankan penyelesaian masalah atas polemik kebijakan vaksinasi berbayar adalah dengan membatalkan kebijakan tersebut dan tetap menggratiskan pemberian vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat. Rekomendasi tersebut berdasarkan sudut pandang berbagai narasumber dengan berbagai pertimbangan. Secara umum, Tabel 10 menunjukkan elemen *treatment recommendations* pada berita Tempo.co.

Tabel 10. Elemen *Treatment Recommendations* Berita Tempo.co

Judul	<i>Treatment Recommendations</i> dalam Teks Berita
KSPI Persoalkan Rencana Vaksinasi Individu Berbayar: Berpotensi Komersialisasi	Pemberian vaksin untuk buruh dan setiap warga negara digratiskan.
Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi	Jika memang vaksin harus berbayar, ia mengatakan saat ini adalah bukan saat yang tepat karena pandemi masih berlangsung. Vaksin baru bisa dikomersilkan hanya jika penyakit sudah menjadi endemi, penyakit yang sudah melewati masa kritisnya.
Sederet Kritik terhadap Program Vaksinasi Berbayar	Program Vaksinasi Gotong Royong Individu tersebut harus ditolak.
Demokrat Khawatir Vaksin Berbayar Membuat Publik Ragu Kualitas Vaksin Gratis	Pemberian vaksin harus gratis, tidak boleh dikomersilkan.
Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar, Koalisi Curiga Ada Motif Cuan	Kebijakan vaksinasi berbayar harus dibatalkan.

Sumber: Hasil Penelitian

Rekomendasi penyelesaian masalah dalam berita-berita Tempo.co diperkuat dengan argumen-argumen dari para narasumber. Tidak hanya rekomendasi untuk membatalkan kebijakan vaksinasi berbayar, rekomendasi tersebut juga disertai dengan langkah alternatif yang disarankan sebagai solusi untuk pemerintah. Sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan KSPI yang mengharapkan pemberian vaksin digratiskan. Said Iqbal selaku perwakilan KSPI, memberikan saran penyelesaian atas persoalan vaksinasi sebagai berikut:

Bilamana pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan vaksin gotong royong ini, Iqbal menyarankan agar pemerintah menaikkan sedikit nilai pajak badan perusahaan (PPH 25) dan mengambil sebagian anggaran Kesehatan yang dalam UU Kesehatan besarnya adalah 5 persen dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di bidang kesehatan.

Tempo.co juga menyajikan sudut pandang epidemiolog mengenai penekanan penyelesaian masalah kebijakan vaksinasi berbayar. Menurut Dicky Budiman, epidemiolog dari Griffith University, bagaimanapun kondisi Indonesia masih krisis pandemi tidak memungkinkan untuk mengadakan layanan vaksinasi berbayar. Dengan demikian, kebijakan vaksinasi berbayar pada *frame* ini menegaskan bahwa layanan vaksinasi berbayar adalah kebijakan yang tidak tepat, karena itu sebaiknya kebijakan itu dibatalkan.

Jika memang vaksin harus berbayar, ia mengatakan saat ini adalah bukan saat yang tepat karena pandemi masih berlangsung. Vaksin baru bisa dikomersilkan hanya jika penyakit sudah menjadi endemi, penyakit yang sudah melewati masa kritisnya.

Pada artikel berita Tempo.co dengan *headline* “Sederet Kritik terhadap Program Vaksinasi Berbayar” (13 Juli 2021), wartawan Tempo.co menghimpun beragam kritik dari berbagai sumber. Tempo.co menghimpun sumber yang seluruhnya secara tegas menyuarakan untuk menolak kebijakan vaksinasi. Salah satu yang disorot wartawan Tempo.co yaitu kritik dari seorang ekonom senior, Faisal Basri, yang secara tegas menolak kebijakan vaksinasi berbayar melalui unggahannya di media sosial.

"Pasokan vaksin masih terbatas. Praktik jualan vaksin adalah tindakan biadab," ujar dia dalam cuitannya di akun @FaisalBasri, Minggu, 11 Juli 2021. Ia pun meminta pemerintah untuk melarang praktik tersebut. "Pemerintah harus melarangnya, apalagi yang jualan BUMN," kata dia.

Tempo.co juga memilih penekanan penyelesaian masalah dari Perwakilan Koalisi dari Laporan Covid-19 untuk disajikan di beritanya. Pemerintah seharusnya melakukan upaya lain seperti peningkatan *testing* dan *tracking* sebagai upaya penanggulangan Covid-19. Pada artikel berita Tempo.co dengan *headline* “Pemerintah Ngotot Vaksin Berbayar, Koalisi Curiga Ada Motif Cuan” (15 Juli 2021), kutipan wawancara tersebut sebagai berikut:

Menurut Amanda, Badan Usaha Milik Negara mestinya diminta untuk membantu peningkatan pengetesan (testing) dan pelacakan kontak (tracing) ketimbang menjadi penyelenggara vaksin Covid-19 berbayar.

Frame yang dibentuk Tempo.co menampilkan apa yang dikonsepsi oleh wartawan Tempo.co melalui laporan beritanya yaitu bahwa penyelesaian polemik kebijakan vaksinasi berbayar adalah dengan membatalkan kebijakan tersebut. Tiga elemen *framing* sebelumnya yang dikembangkan Tempo.co pada akhirnya juga mempengaruhi bagaimana rekomendasi penyelesaian yang disarankan. Bagi Tempo.co, penanganan Covid-19 melalui layanan vaksinasi berbayar bukan langkah yang tepat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Republika Online dan Tempo.co mengkonstruksi isu kebijakan vaksinasi berbayar dengan *framing* yang berbeda. Bentuk *framing* berita sangat bergantung dengan situasi internal organisasi termasuk kepemilikan media. Republika Online mengkonstruksi kebijakan vaksinasi berbayar sebagai upaya penanganan Covid-19 yang strategis dan rasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa posisi Erick Thohir sebagai Direktur Utama Republika Online sekaligus Menteri BUMN memiliki keterkaitan pada proses konstruksi berita mengenai kebijakan vaksinasi berbayar. Republika Online lebih banyak menyajikan sudut pandang dari narasumber yang pro terhadap kebijakan vaksinasi berbayar. Kebijakan vaksinasi berbayar dibingkai Republika Online sebagai langkah pemerintah yang direkomendasikan pada khalayak untuk didukung.

Sedangkan Tempo.co membingkai isu kebijakan vaksinasi berbayar sebagai polemik yang mendatangkan banyak kritik dan penolakan. Tempo.co mengedepankan sudut pandang dari berbagai pihak yang kontra terhadap kebijakan vaksinasi berbayar. Bentuk *framing*

tersebut dapat dikaitkan pula dengan Tempo.co sebagai media yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah dan berprinsip untuk meliput peristiwa dan menuliskannya secara tajam, cerdas dan berimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Chandra Gian. "Kisah Vaksin Berbayar yang Akhirnya Dibatalkan Jokowi!" *CNBC Indonesia*, 17 Juli 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210717113633-4-261639/kisah-vaksin-berbayar-yang-akhirnya-dibatalkan-jokowi/1>.
- Azizah, Khadijah Nur. "Ada Vaksin Covid-19 Berbayar di Kimia Farma, Ini Harga dan Jenis Vaksinnya" *detikhealth*, 11 Juli 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5638953/ada-vaksin-covid-19-berbayar-di-kimia-farma-ini-harga-dan-jenis-vaksinnya>.
- Chairani, Desita., & Kania, Dessy . "Konstruksi Realitas dalam Pemberitaan Pelantikan Presiden Joko Widodo: Analisis Framing pada Laporan Utama Majalah TEMPO dan Majalah Gatra. *Journal Communication Spectrum*, Vol. 3, no.2 (2013): 121-139.
- Eriyanto. "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media." Yogyakarta: LKIS. 2015.
- Gunadi. "Ini Penyebab Varian Delta Begitu Dominan dalam Ledakan COVID-19. Mampukah Vaksin Melawannya?" *The Conversation*, 13 Juli 2021 <https://theconversation.com/ini-penyebab-varian-delta-begitu-dominan-dalam-ledakan-covid-19-mampukah-vaksin-melawannya-163490> .
- Karman. "Media dan Konstruksi Realitas: Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Koran Tempo Mengenai Kasus Ledakan Bom di Masjid Mapolres Cirebon." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol.16, no.1 (2012): 27-46.
- Nadia, Siti. Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. 15 Januari 2021. https://persi.or.id/wp-content/uploads/2021/01/paparan_adinkes_rakernassus.pdf.
- Paramasari, Silvia Nevane. "Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Upaya Membangun Partisipasi Publik pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, Vol. 5, No.1 (2021): 123-132
- Plays, T. "Purposive sampling In L. M. Given (Ed.) *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research*, (2): 697-698. 2008.
- Putri, Budiarti Utami. "Epidemiolog Sebut Airlangga dan Erick Thohir Dalang Gagasan Vaksin Berbayar." *Tempo.co*, 14 Juli 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1483143/epidemiolog-sebut-airlangga-dan-erick-thohir-dalang-gagasan-vaksin-berbayar>.
- Rahardaya, Astrid Kusuma. "Strategi Akomodasi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran Secara Daring Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, Vol. 5, No,1 (2021): 110-112.
- Santi, Sarah. "Frame Analysis: Konstruksi Fakta dalam Bingkai Berita." *Forum Ilmiah*, Vol. 9, No.3 (2012): 219-232.
- Siyoto, Sandu, & Sodik, M. Ali. "Dasar Metodologi Penelitian". Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sobur, Alex. "Analisis Teks Media: Suatu Pengantar". Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Susanti, Santi. "Humor dan Covid-19: Makna Pesan dalam Akun Instagram @t_faturahman." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, Vol. 5, No. 1 (2021): 1-9
- Syaipudin, Latif. "Peran Komunikasi Massa di Tengah Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung." *Kalijaga Journal of Communication*, Vol. 2, No. 1 (2020): 14-34.
- Wafi, Ahmad Abdul, & Haes, Putri Eka. (2020). "Kredibilitas Portal Berita Online Dalam Pemeberitaan Covid-19: Studi kasus Tribun Bali Periode Maret-Juni 2020." *Jurnal Masyarakat Merdeka*, Vol. 3, No. 1 (2020): 31-37.

Wirawan, I Wayan . “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia”. *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar* (pp. 179-188). 2020. Denpasar: Universitas Mahasaraswati Denpasar

Zellatifanny, Cut Medik & Mudjiyanto, Bambang. Tipe Penelitian Deskripsi dalam Komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (2018) : 83-90.